

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rahmawita¹, Sumarlin², Della Fadhilatunnisa³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹Rahmawitarasyid@gmail.com ²Sumarlin@uin-alauddin.ac.id ³della.fadhilatunisa@uin-alauddin.ac.id

Abstract, *This study aims to investigate the implementation and form of local financial accounting systems in enhancing the integrity of local government financial reports. The research method used is qualitative with a phenomenological approach, utilizing primary data from interviews and observations as well as secondary data. The study was conducted at the Office of Community Empowerment and Village Affairs of Gowa Regency, South Sulawesi Province. The results of this study illustrate how the local financial accounting system can enhance the integrity of financial reports through financial management information system (FMIS) and Local Government Information System (SIPD), which provide features that assist in financial management from planning to reporting. The issuance of LAKIP by the Community Empowerment Office also contributes to the transparency and accountability of local government. The Gowa Regency Government has achieved an unqualified opinion for the 11th consecutive time, demonstrating compliance with accounting and financial standards. The implications of this research emphasize that local financial accounting systems can support the integrity of financial reports by focusing on efficiency and effectiveness to prevent manipulation of financial statements.*

Keywords: *Regional Financial Accounting System, Financial Statement Integrity*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan dan bentuk sistem akuntansi keuangan daerah dalam meningkatkan integritas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, menggunakan data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah mampu meningkatkan integritas laporan keuangan melalui aplikasi tata kelola keuangan seperti FMIS dan SIPD, dengan fitur-fitur yang membantu pengelolaan keuangan dari perencanaan hingga pelaporan. Penerbitan LAKIP oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Gowa telah meraih opini WTP selama 11 kali berturut-turut, menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan keuangan. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dapat mendukung integritas laporan keuangan, dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas untuk mencegah manipulasi laporan keuangan.

Kata Kunci: *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Integritas Laporan keuangan*

PENDAHULUAN

*Koresponden

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

Perkembangan Reformasi di Indonesia menimbulkan pandangan baru dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan banyaknya Daerah Otonomi yang terus melakukan pemekaran pada wilayahnya. Hal tersebut menuntut Pemerintah untuk membuat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang fleksibel dan mampu membuat setiap wilayah dapat menggunakannya dengan transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih untuk sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Handayani et al., 2022). Sistem Keuangan Daerah biasanya di dimanfaatkan untuk tempat manipulasi data oleh beberapa oknum aparaturnya pelaksana negara maka dari itu, pentingnya Integritas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan (Indriani & Hermi, 2020). Standar Akuntansi Pemerintahan yang lebih sistematis untuk Pengelolaan Keuangan yang lebih baik adalah salah satu kegiatan dari Reformasi Keuangan, yaitu adanya Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintahan (Erwinton Putra Antonius Tarigan; Lastria Nurtanzila, 2013). Dalam penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) butuh upaya yang maksimal, ini adalah salah satu kendala atau tantangan Akuntansi Pemerintahan untuk tercapainya Integritas Laporan Keuangan. Kelemahan pada sistem pengendalian internal, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mengerti dalam Akuntansi Pemerintahan dan ditambah semrawutnya kepentingan Politik yang menunggangi ini membuat penggunaan Anggaran yang cenderung melanggar aturan yang berefek pada penyajian laporan keuangan yang akuntabel, dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan (Auliyana, 2017).

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencegah terjadinya fraud adalah dengan melakukan pengendalian yang berbasis sistem (Majid et al., 2022). Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebuah kebijakan yang diambil untuk tata kelola keuangan oleh pemerintah untuk efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan. Theory Stewardship berkaitan dengan bagaimana pihak manajemen mengambil langkah yang tepat dengan mempertimbangkan bagaimana kepentingan dari seluruh stakeholder baik itu pihak internal dan pihak eksternal yang terkait dengan kebijakan tersebut. Theory Stewardship menekankan pada kepentingan umum dalam pencapaian tujuan. Sepanjang tahun 2022 di wilayah Kab. Gowa telah terjadi 6 kasus perkara korupsi dana desa, dan ini memberi catatan buruk untuk Kab. Gowa. kebanyakan motif yang dilakukan adalah mark-up dan proyek fiktif yang semuanya dibebankan kepada anggaran desa (Muhaimin, 2022). Salah satunya adalah Kasus korupsi pengadaan truk sampah yang melibatkan 86 desa dari 121 desa, yang kerugiannya ditaksir mencapai 9 miliar rupiah. Dalam kasus korupsi tersebut, lima orang ditetapkan menjadi tersangka. Mereka yakni, AS (mantan Kadis PMD Kabupaten Gowa), AM (penyedia PT Bima Rajamawellang), SA (koordinator bendahara di Pallangga) (Wahab, 2022)

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk membuktikan bagaimana sistem yang digunakan bisa membantu sebuah tugas. Tidak terlepas dari sektor publik dimana di era perkembangan teknologi sektor publik sudah massif menggunakan sistem dalam mencapai tujuan sebagai alat penunjang. Penelitian ini bertujuan untuk eksplorasi sistem yang di gunakan pemerintah dalam menunjang integritasnya, di era massifnya perkembangan teknologi dimana dapat memudahkan namun juga dapat berdampak yaitu seperti manipulasi data yang dilakukan oleh beberapa oknum. Dengan adanya penelitian ini beberapa instansi dapat lebih mawas dalam menggunakan sistem yang digunakan sebagai penunjang dari aktivitas operasional instansi.

TINJAUAN LITERATUR

Theory Stewardship

Theory stewardship mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal (Raharjo, 2015). Berdasarkan asumsi Theory stewardship yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan bahwa keuntungan manajer dan pemilik atau prinsipal berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi dan secara ekonomi. Sharma (2011) menjelaskan bahwa Theory stewardship berfokus pada kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa

menghalangi kepentingan masing-masing pihak. Organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga Theory stewardship dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik (Eksandy et al., 2019). Aparatur pemerintah yang bertindak sebagai pelaksana harus mengutamakan tujuan organisasi daripada tujuan pribadi ketika menghitung alokasi dana desa berdasarkan pengelolaan. Aparat bertindak sesuai dengan keinginan kepala sekolah, yang dinyatakan sebagai harapan masyarakat. Oleh karena itu, penguasa harus memprioritaskan tujuan organisasi, yaitu memastikan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi harapan masyarakat, sebelum mengejar tujuan mereka sendiri dari hasil kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat dan aparat, atau pelaksana dan kepala sekolah, memiliki hubungan timbal balik (Juliana, Sumarlin, 2023).

Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi merupakan teknik yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak luar ataupun dalam suatu instansi tertentu. Setiap instansi diberi kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan strategi berbeda yang digunakan untuk menghasilkan informasi bagi publik. Dalam penyajian informasi tersebut harus mengikuti standar akuntansi, sehingga penting untuk merencanakan sistem akutansinya, hal ini ditujukan agar hasil laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan norma dan memuat informasi yang bermanfaat bagi para stakeholder (Erniati, 2019). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian metode mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer (No.59, 2007). Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi satu masa periode pada suatu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah (Andini and Yusrawati 2015). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam peraturan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pasal 6 yaitu Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban pendapatan-LRA, belanja, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD (Republik Indonesia 2013).

Integritas Laporan Keuangan

Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang disembunyikan (Hardiningsih, 2010). Integritas laporan keuangan menunjukkan informasi yang benar, jujur, akurat serta bebas dari tindakan yang dilaukan dan disengaja oleh pihak manajemen perusahaan dalam memanipulasi angka-angka akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan (Citra, 2013). Apabila laporan keuangan yang tidak berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang overstate, maka akan sangat merugikan bagi pengguna keuangan tersebut (Hardiningsih, 2010). Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut, sehingga memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan yang tepat. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan juga harus memiliki nilai informasi yang berkualitas agar berguna dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian Laporan Keuangan akan dikatakan bermanfaat. Tak hanya itu, Laporan keuangan juga harus menyajikan fakta yang jujur serta tersertifikasi (Ardiyanto & Surasni, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam. Jenis penelitian kualitatif akan sesuai digunakan untuk penelitian seperti hal-hal berikut yaitu: masalah penelitian belum jelas(masih samar atau mungkin

masih gelap), untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang lain, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan untuk meneliti sejarah perkembangan (Abdussamad, 2021)).

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara Dari beberapa informan yang memiliki kaitan Tugas pada sistem akuntansi keuangan dan telah berpengalaman dalam pengelolaan keuangan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

Metode Penelitian

Untuk Analisis dan Interpretasi suatu data dengan baik, diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan dapat mendeskripsikan kondisi suatu objek yang sedang diteliti dengan benar. Berangkat dari hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan internet searching. Kelima metode dipilih agar pengumpulan data dapat dilakukan secara maksimal.

Instrumen Penelitian

Dalam observasi peneliti menggunakan buku catatan atau alat tulis menulis peneliti menggunakan buku catatan atau alat tulis menulis agar pada saat melakukan penelitian dapat dengan mudah mencatat dengan baik beragam peristiwa yang ada di lokasi penelitian. Untuk wawancara peneliti menggunakan beberapa alat untuk pengumpulan data seperti pedoman wawancara, handpone serta alat perekam. Pedoman wawancara di gunakan untuk lebih mempermudah dalam hal mengingat apa yang berhubungan dengan obyek penelitian pada saat wawancara. Handpone digunakan untuk mengambil gambar dan merekam pada saat wawancara dilakukan supaya dapat mempermudah dalam menganalisis hasil wawancara dan dijadikan sebagai lampiran dari hasil penelitian.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama analisis data adalah menyediakan informasi untuk pemecahan masalah. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan internet searching dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara menyeluruh. Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. analisis data dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: pengumpulan data penelitian, transkrip data, analisis data, triangulasi, dan penyimpulan akhir.

Uji Keabsahan Data

Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan dalam penelitian sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendekatan filosofis dan metodologis terhadap penelitian sosial. Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan melalui empat uji, yaitu credibility (validitas internal), transferbility (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Adapun penelitian ini hanya menggunakan satu uji yang paling sesuai, yaitu credibility atau kredibilitas. Uji kredibilitas disebut juga dengan uji validitas internal pada penelitian kuantitatif, dimana kredibilitas ini dapat dicapai dengan kemampuan peneliti untuk berbaur dengan responden dalam waktu lama dengan terus melakuakn konfirmasi-konfirmasi (Afiyanti, 2008). Namun, karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah menggunakan metode triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang digunakan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam meningkatkan Integritas laporan keuangan pemerintah daerah)

Dalam mengoptimalkan integritas laporan keuangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa menerapkan dua bentuk sistem akuntansi keuangan daerah: SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan FMIS (Financial Management Information System). Integrasi keduanya menciptakan landasan yang kuat untuk tata kelola keuangan yang efisien dan transparan. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dampak positif penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap integritas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dan di dukung oleh permendagri No.77 tahun 2020 menunjukkan bahwa dua bentuk aplikasi tersebut, yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Financial Management Information System (FMIS), memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan tersebut.

Integrasi SIPD dan FMIS)

Penelitian menyoroti integrasi yang efektif antara SIPD dan FMIS. Kedua sistem saling melengkapi dalam mencakup berbagai aspek manajemen keuangan, mulai dari anggaran hingga pelaporan, sehingga menciptakan ekosistem yang terpadu

Akurasi dan Ketepatan Waktu

Penerapan SIPD dan FMIS memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akurasi pencatatan transaksi keuangan. Data yang tercatat secara akurat dan ketepatan waktu dalam kedua aplikasi ini memberikan dasar yang kokoh untuk integritas laporan keuangan.

Pengendalian Internal yang Ditingkatkan

Kedua aplikasi, SIPD dan FMIS, memainkan peran penting dalam meningkatkan pengendalian internal. Pemisahan tugas, validasi data, dan otomatisasi proses mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan, mendukung integritas laporan keuangan.

Pelaporan Real-Time yang Akurat

FMIS memungkinkan penyusunan laporan keuangan real-time yang akurat, sementara SIPD menyediakan informasi terkini mengenai anggaran dan pengeluaran. Kombinasi keduanya memberikan gambaran lengkap dan up-to-date terhadap keuangan daerah

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Integrasi SIPD dan FMIS menghasilkan peningkatan transparansi dengan memberikan akses yang terkendali kepada pihak berkepentingan. Masyarakat, auditor, dan pihak yang terlibat lainnya dapat mengawasi dan mengaudit keuangan daerah dengan lebih efektif.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Penerapan kedua sistem ini memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan. Proses otomatisasi dalam FMIS dan manajemen anggaran yang terintegrasi dalam SIPD membantu pemerintah daerah dalam alokasi anggaran yang lebih efisien.

Dampak Terhadap Kepuasan Pengguna

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna, termasuk staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan kepuasan terhadap penggunaan SIPD dan FMIS. User-friendly, integrasi yang baik, dan efisiensi operasional adalah aspek yang menciptakan kepuasan tersebut.

Tantangan dan Peluang

Penelitian juga mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi, seperti kebutuhan pelatihan tambahan dan perubahan budaya organisasi. Namun, melihat peluang untuk terus meningkatkan integrasi dan pengoptimalan kedua sistem.

Melalui penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD dan FMIS, integritas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gowa dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan dasar yang kokoh untuk tata kelola keuangan yang baik. Theory stewardship menyatakan bahwa manusia memiliki sifat tanggung jawab, memiliki integritas dan dapat dipercaya. dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem akuntansi keuangan yang dapat menyokong integritas laporan keuangan hal ini di dukung pula oleh penelitian dari Aritonang (2017), bahwa Pelaksanaan program e-government berkaitan dengan kebijakan reformasi administrasi publik di Indonesia. Kebijakan e-government harus menjadi salah satu bagian terpenting dari keseluruhan agenda reformasi birokrasi. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengubah paradigma administrasi publik dari konvensional menjadi lebih maju. Setiap kebijakan mengenai program reformasi birokrasi mengatur masalah e-government secara khusus.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam meningkatkan integritas laporan keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah metode pengelolaan keuangan secara manual maupun terkomputerisasi untuk membantu setiap satuan kerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang efektif dan efisien. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten gowa adalah salah satu SKPD yang menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang terkomputerisasi. sebuah sistem akuntansi yang baik akan mampu meminimalisir terjadinya fraud ataupun manipulasi data yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat sipil. Terlebih lagi Kabupaten Gowa merupakan Kabupaten yang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian dengan jumlah 11 kali ini merupakan suatu hal yang membanggakan bagi pemerintah Kabupaten Gowa, namun hal tersebut belum menjamin pemerintah Kabupaten Gowa terbebas dari masalah korupsi dan manipulasi data. Pada periode Tahun 2022 Kabupaten Gowa tersandung kasus korupsi terhadap pengadaan truk sampah yang melibatkan hampir seluruh kepala desa yang kerugiannya mencapai 9 miliar rupiah.

Sistem keuangan daerah diciptakan bukan hanya untuk efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan namun dapat membantu terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. DPMD merupakan salah satu SKPD yang memiliki fungsi untuk pemberdayaan masyarakat desa baik itu dari segi sosial hingga ekonomi. Integritas laporan keuangan merupakan hal yang harus di wujudkan oleh setiap instansi yang mengelola keuangan terlebih lagi ditengah banyaknya kasus korupsi dan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Integritas dalam pemerintah daerah adalah salah satu prinsip yang harus ditanamkan oleh pemerintah, karena ini menyangkut bagaimana pemerintah sebagai pengelola amanah dari rakyat untuk mengemban tugas yang telah diberikan, namun isu integritas kepala daerah yang selalu berkaitan dengan kasus korupsi ini membuat integritas kepala daerah selalu menjadi bahan berita untuk diangkat kehalayak umum, seperti berita yang peneliti dapatkan yaitu: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selama tahun 2021 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sebanyak 127 kepala daerah, Menteri Sri Mulyani juga mengatakan, tata kelola penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) belum optimal, meski pemerintah pusat sudah melakukan desentralisasi fiskal alias otonomi daerah sejak tahun 2004. Bendahara Negara ini menyebut, belum optimalnya tata kelola terlihat dari disparitas kinerja Pemda di masing-masing daerah. Begitu pula adanya isu transparansi dan integritas kepala daerah (Fika, 2021).

Pada tahun 2022 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2016, pada umumnya telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing unit kerja eselon III dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, pada umumnya telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan sasaran program dan kegiatan. Dalam tercapainya target dari indikator sasaran kinerja di tahun 2022 beberapa faktor berperan dalam mendukung keberhasilan namun juga menemui beberapa hambatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menetapkan sasaran strategis untuk tahun 2022 berupa "Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa" yang diukur melalui 11 indikator, yang berhasil dicapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,24% dengan efisiensi anggaran sebesar 9,54%. Nilai tersebut tampak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja dari tahun 2021 yang mencapai 148,75% namun hal tersebut dapat dimaklumi dikarenakan di tahun

2022 terjadi peralihan periode RPJMD yang berdampak pada perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang diukur. Mengacu pada Target Jangka Menengah, realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2022 telah berhasil memenuhi Target Jangka Menengah, bahkan beberapa indikator telah melampaui nilai Target jangka Menengah. Tingkat capaian Kinerja Sasaran Program Prioritas Tahun 2022 pada umumnya sudah sesuai dengan Target Sasaran yang ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Meskipun terdapat penurunan rata-rata capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut dapat dimaklumi karena adanya peralihan periode RPJMD yang berdampak pada perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja. Meski demikian, Dinas tersebut berhasil mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100,24%, dengan efisiensi anggaran sebesar 9,54%. Meskipun terjadi penurunan, realisasi kinerja masih memenuhi Target Jangka Menengah dan beberapa indikator bahkan melampaui nilai Target Jangka Menengah.

Dalam konteks theory stewardship, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diinterpretasikan sebagai lembaga yang menjalankan tanggung jawabnya dalam mencapai kemajuan kemandirian desa. Meskipun mengalami perubahan sasaran strategis, dinas tetap berupaya mencapai target dan bahkan melampaui beberapa indikator. Pendekatan fenomenologi dapat membantu memahami pengalaman dan persepsi individu yang terlibat dalam proses pencapaian kinerja tersebut, termasuk peran mereka dalam menjaga integritas dan efektivitas pelaksanaan program.

KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk penerapan sistem akuntansi keuangan daerah untuk menunjang integritas laporan keuangan telah dilaksanakan dengan 2 bentuk aplikasi yaitu Information Financial Management System (FMIS) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Aplikasi tersebut sangat membantu DPMD untuk melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sudah terintegrasi dengan seluruh SKPD Kabupaten Gowa, kedua aplikasi ini dapat menampilkan rerata realisasi setiap SKPD. aplikasi tersebut berfungsi sebagai Penatausahaan keuangan dari pembukuan, inventaris hingga melaporkan hal terkait anggaran yang saling terintegrasi dengan setiap SKPD.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada DPMD telah berintegritas dimana laporan keuangan telah dibuat secara lengkap, berdasarkan UU No.71 2010 tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan dan didukung juga dengan kebijakan dan peraturan yang ada sehingga terciptanya akuntabilitas dan transparansi. Wujud transparansi yang dilakukan adalah dengan adanya CaLK setiap periode akuntansi yang berisi setiap seluk beluk kejadian yang terjadi pada tahun tersebut, selain itu penerbitan LAKIP setiap tahunnya dilakukan sebagai gambaran kinerja dari DPMD; dan untuk wujud akuntabilitas yang dilakukan adalah dengan menerapkan beberapa aplikasi sistem manajemen akuntansi yang dapat mempermudah perencanaan dan tata kelola anggaran dan manajemen dan bentuk pertanggungjawabannya telah dituangkan secara rinci pada LAKIP serta Kabupaten Gowa juga telah 11 kali mendapatkan Opini wajar tanpa pengecualian untuk DPMD sendiri setiap 6 bulan sekali diperiksa oleh inspektorat dan setiap periodenya diaudit oleh BPK.

Adapun beberapa keterbatasan yang di temui dan mungkin memberi pengaruh pada hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diuraikan sebagai berikut: Keterbatasan dalam menemukan referensi atau sumber data terkait Materi penelitian dan Informan yang masih belum banyak memahami tentang integritas laporan keuangan. Keterbatasan dalam menemukan data atau dokumen terkait laporan keuangan dari informan karena data tersebut belum lengkap dan belum bisa diberikan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). metode penelitian kualitatif.
Adisuryo, R. D. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
Arfianty, A., & Virलयani, A. (2017). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd)

- Dan Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2), 80–90. <https://doi.org/10.35906/jep01.v3i2.205>
- Ariani, I., Bulutoding, L., & Namla Elfa Syariati. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 65–81. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29627>
- Aritonang, D. M. (2017). The Impact of E-Government System on Public Service Quality in Indonesia. *European Scientific Journal*, ESJ, 13(35), 99. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n35p99>
- Asmarani, M., & Kusumaningtias, R. (2019). Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya Marlia Asmarani Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya Rohmawati Kusumaningt. *AKUNESA Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1).
- Asmira, S. (2021). akrual basis dalam metafora amanah perwujudan integritas laporan keuangan. 1–23. Atmadja, A. T. (2013). Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. *Akuntansi Profesi*, 3(2), 122–141.
- Auliyana, E. (2017). Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit Wtp Di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 4(1), 22– 33. <https://doi.org/10.17977/um004v4i12017p022>
- Eksandy, Hakim, M. Z., & Ekawati, Ekaw, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 85. <https://doi.org/10.31000/competitive.v2i2.917>
- Erniati. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Seagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/beritaterbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-seagai-wujud-akuntabilitaspengelolaan-keuangan-negara.html>
- Erwinton Putra Antonius Tarigan; Lastria Nurtanzila. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 29–45.
- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono. (2018). Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 8(1), 5.
- Fika Nurul Ulya, A. N. K. M. (2021). Sri Mulyani: Integritas Bermasalah, Ada 127 Kepala Daerah Jadi Terpidana Kasus Korupsi.
- fransisca christy rosana. (2021). Sri Mulyani: Pencegahan Korupsi Tidak Boleh Hanya Slogan. [https://bisnis.tempo.co/read/1452147/sri-mulyanipencegahan-korupsi-tidak-boleh-hanya-slogan#:~:text=TEMPO.CO%2C Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan,integritas. "Upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya slogan.](https://bisnis.tempo.co/read/1452147/sri-mulyanipencegahan-korupsi-tidak-boleh-hanya-slogan#:~:text=TEMPO.CO%2C Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan,integritas.)
- Glinkowska, B., & Kaczmarek, B. (2016). Classical and modern concepts of corporate governance (Stewardship Theory and Agency Theory). *Management*, 19(2), 84–92. <https://doi.org/10.1515/manment-2015-0015>
- Gowa, D. kabupaten. (2022). laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten gowa.
- halim abdul. (2007). sistem keuangan daerah.
- Handayani, Darwanis, & Abdullah, S. (2022). Determinan Manipulasi Akrual Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 275–291. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21502>
- Indriani, A., & Hermi, H. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Keuangan Daerah. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 99–116. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.6947>
- Irfan, I., Majid, J., Umar, M., & Aditiya, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 108–121. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.21746>
- James H. Davis, F. D. S. dan L. D. 1997. (1997). "Toward a Stewardship Theory of Management." *Academy of Management Review* Vol. 22, No. 1, page 22?47, 199.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28. <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/162>
- Juliana, Sumarlin, F. fajrin. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Kesejahteraan

- Masyarakat Desa Dalam Bingkai Sipakatau Assamaturu Na Sipakalebbere. 4, 72–91.
- Kahar, K., Majid, J., & Fadhilatunisa, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 54–64. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29115>
- Lasa, D. (2022). Transaksi Pemerintah Non Tunai dan Harapan Ke Depan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntt/id/data-publikasi/artikel/2881-transaksi-pemerintah-non-tunai-dan-harapan-ke-depan.html>
- Majid, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2(1), 33–46.
- Majid, J., Ramli, B., Fatahillah, R., & Praditha, R. (2022). Motivasi Whistleblower : Mengungkap Fraud Keuangan Daerah dalam Konsep Amar Ma ' ruf nahi Mungkar. 1(1), 39–54.
- Muis, A. (2021). Metafora Amanah; perwujudan akuntabilitas dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi pada desa Lunjen, kabupaten Enrekang).
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Nasution, M. D. (2020). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 100–105. No.59, P. (2007). Menteri dalam negeri republik indonesia. 1–13.
- Nordiawan, D. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba 4, 2010
- Peraturan Pemerintah. (2005). Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. 09 Desember, 105. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 1– 445.
- Pratama, wirja wahyu. (2020). Analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada kantor camat semadam kabupaten aceh tenggara). 21(1), 1– 9.
- Raharjo. (2015). The Accounting Perspective. *Enterprise Risk Management*, 31– 41. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- Sugi, F. A. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Toraja Utara.
- Suhardi, S. (2015). Persepsi Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Independensi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 1. <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1249>
- Wahab, S. Z. S. (2022). Diduga Korupsi Rp9 Miliar, Kejari Gowa Tetapkan Lima Tersangka Kasus Pengadaan Truk Sampah di Gowa Penulis: Sayyid Zulfadli Saleh Wahab | Editor: Saldy Irawan. <https://makassar.tribunnews.com/2022/08/01/diduga-korupsi-rp9-miliar-kejari-gowa-tetapkan-lima-tersangka-kasus-pengadaan-truk-sampah-di-gowa>
- Warnoto. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas LKPD untuk Mempertahankan Opini WTP. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3995-strategi-peningkatan-kualitas-lkpd-untuk-mempertahankan-opini-wtp.html>